

**PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN ANGKA
HARAPAN HIDUP TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA PERIODE 2011-2016**

Oleh:

AISYATURRIDHO

NIM 51141065

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, ANGKA
HARAPAN HIDUP TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN**

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERIODE 2010-2016

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri sumatera utara

OLEH

AI SYATURRIDHO

NIM. 51141065



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

Skripsi berjudul **“PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN ANGKA HARAPAN HIDUP TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2010-2016”**. Aisyaturridho, NIM. 51141065 Prodi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 06 November 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, 07 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,



Dr. Marliyah, M.A
NIP. 19760126 200312 2 003

Sekretaris,



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIP. 19910129 201503 2 008

Anggota

Pembimbing I



Drs. Sugianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003

Pembimbing II



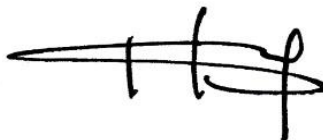
Annio Indah Lestari, SE, M.Si
NIP. 19740309 201101 2 003

Penguji I



Imsar, M.Si
NIP. 19870303 201503 1 004

Penguji II



Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 19730510 199803 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP. 19760507 200604 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, ANGKA
HARAPAN HIDUP TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA
UTARA PERIODE 2011-2016**

Oleh :

AISYATURRIDHO

NIM : 51141065

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Menyetujui

PEMBIMBING I



Drs. Sugianto, MA

NIP. 19670607 200003 1 003

PEMBIMBING II



Annio Indah Lestari, SE, M.Si

NIP. 19740309 201101 2 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marliyah, M.A

NIP. 19760126 200312 2 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AISYATURRIDHO
NIM : 51141065
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 08 November 1996
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Purnawirawan No. 17

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, ANGKA HARAPAN HIDUP TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2011-2016”** benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Medan, 01 November 2018

Penulis

AISYATURRIDHO

NIM : 51141065

ABSTRAK

Aisyaturridho. 2018 “ *Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2016* “ Juusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera (UIN-SU). Pembimbing I. Drs. Sugianto, MA. Pembimbing II. Annio Indah Lestari, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB), dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian diambil dari badan pusat statistik (BPS) sebanyak 7 tahun berkisar dari tahun 2010-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Teknik analisis data menggunakan model regresi linier berganda dengan taraf signifikan 0,05 (5%) yang didukung dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel inflasi dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*R square*) variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,80 atau 80%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel inflasi, PDRB dan kesehatan dapat menjelaskan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 80% sedangkan sisanya 20% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Kata Kunci : Inflasi, PDRB, Kesehatan, Kemiskinan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan Periode 2010-2016”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad saw, serta keluarga dan Sahabatnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, pertama sekali penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua, Buya tercinta Drs. H. M. Yahya Zakaria dan Umi tersayang Fathimah Laila, SH yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga dapat mengenyam pendidikan sampai bangku perkuliahan. Kemudian kepada seluruh anggota keluarga yang telah banyak memberikan saya bantuan dan dukungan.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.A sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Sugianto, MA dan Ibu Annio Indah Lestari, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
7. Kakak saya Izzawati Humairo, S.Pd, M.Si, kedua abang saya Habiburrahman, S.Pd.I, M.A dan juga Muhammad Kholis, S.Pd, yang sedang menyelesaikan studi S2 nya agar diberi kelancaran, dan seluruh keluarga saya.

8. Sahabat - sahabat Jurusan Ekonomi Islam Stambuk 2014 (Retno Utami, Mahdalena Arif, Susilawati, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu).
9. Sahabat-sahabat saya semasa SMA yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini (Indriyani Dhian. R, S.Pd, Nindy Aulianty)
10. Keluarga Besar Ilmu Ekonomi Syariah (IES) Stambuk 2014.
11. Terimakasih kepada Muhammad Shaf Karim yang telah memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga kepada Ibu Khairina Tambunan yang telah banyak membantu penulis, serta semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari segi materi dan teknik dalam penyajiannya, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari.

Medan, 08 Oktober 2018

Penulis

AISYATURRIDHO
Nim. 51141065

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kemiskinan	8
1. Pengrtian Kemiskinan	8
2. Teori-teori Kemiskinan	10
3. Faktor Penyebab Kemiskinan	11
4. Indikator Kemiskinan	16
5. Metode Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia	20
6. Kemiskinan Menurut Pandangan Islam	22
7. Kriteria Miskin Menurut Pandangan Islam.....	23
B. Inflasi	23
1. Pengertian Inflasi	23
2. Jenis-jenis Inflasi.....	25
3. Faktor Penyebab Inflasi	27
4. Inflasi Menurut Pandangan Islam	27

C. PDRB.....	30
1. Pengertian PDRB	30
2. Metode Perhitungan PDRB.....	31
D. Kesehatan.....	33
E..Penelitian Terdahulu	35
F..Kerangka Teoritis	38
G. Hipotesis	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Defenisi Operasional Variabel.....	42
E. Teknik Pengumpulan data	43
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Penelitian	49
B. Uji Asumsi Klasik.....	52
1. Uji Normalitas	52
2. Uji Autokorelasi	53
3. Uji Linearitas.....	54
C. Uji Hipotesis	55
a. Uji t.....	55
b. Uji F.....	57
c. Uji Determinasi	58
D. Uji Regresi Berganda Metode Ordinary Least Square	58
E. Interpretasi Hasil Penelitian.....	60
1. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan	60
2. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan	61
3. Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan	61
4. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Secara Simultan	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1	Tabel Persentase Kemiskinan, Inflasi, PDRB dan Kesehatan.....	4
2	Tabel Penelitian Terdahulu	36
3	Tabel Persentase Kemiskinan.....	49
4	Tabel Persentase PDRB.....	50
5	Tabel Persentase Inflasi.....	51
6	Tabel Persentase Angka Harapan Hidup.....	59
7	Tabel Hasil Uji Autokorelasi.....	54
8	Tabel Hasil Uji Linieritas.....	55
9	Tabel Hasil Uji t Parsial	55
10	Tabel Hasil Uji Simultan.....	57
11	Tabel Hasil Uji Koefisien Determinan	58
12	Tabel Hasil pengujian regresi berganda	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Kerangka Teoritis	39
2	Hasil Uji Normalitas	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan ekonomi kedua masalah tersebut dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan.¹

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di hampir semua negara berkembang, standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, atau dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan.²

Ada beberapa variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB, pendidikan, inflasi, pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, tetap pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan.³ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga per tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai tahun dasar.⁴

Seperti halnya PDRB pendidikan pun dapat mempengaruhi setiap peningkatan maupun penurunan jumlah kemiskinan. Pendidikan adalah upaya paling efektif untuk meningkatkan

¹Dama dkk, *Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Manado*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Vol. 16 No. 13, Tahun 2016, hlm. 550

²Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 200

³ Anak Agung Istri Diah Paramita, *Pengaruh investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud. Vol. 4 No. 10, Tahun 2015, hlm. 1205

⁴ Dama dkk, *Tingkat Kemiskinan di Manado*, hlm. 549

kualitas sumber daya manusia. Kualitas sosial-ekonomi, kesehatan, dan gizi yang baik tidak akan dapat bertahan tanpa adanya manusia yang memiliki pendidikan yang berkualitas. Pemerintah melakukan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar masyarakat Indonesia menjai SDM yang berkualitas, selain itu juga agar dapat mengurangi kemiskinan dan yang ada dengan banyaknya orang-orang yang dapat mengenyam pendidikan untuk merubah taraf kehidupannya.

Sedangkan inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Jika hanya satu barang saja yang naik itu bukan disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut berpengaruh pada harga barang yang lain. Indonesia memiliki tingkat inflasi yang tinggi dan terus berfluktuatif. Bahkan terkadang tingkat inflasi yang terjadi tidak sesuai dengan prediksi awal. Jenis inflasi seperti ini dapat menurunkan kinerja atau pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya inflasi yang tinggi menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi berkurang. Akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi dan kesejahteraan masyarakat semakin berkurang.⁵

Hal ini juga berhubungan searah dengan pengangguran, dengan meningkatnya jumlah pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat. Dengan menjadi seorang pengangguran artinya dia tidak memiliki pendapatan, akibatnya para pengangguran tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini ketersediaan lapangan kerja lebih sedikit dengan para pencari kerja. Situasi ini diperparah dengan banyaknya penduduk desa yang mencari pekerjaan di perkotaan dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menurut Suryawati dalam skripsi Andri Nurmalita⁶ adalah kesehatan. Masalah kesehatan merupakan hal yang rentan dihadapi oleh masyarakat miskin, hal ini diakibatkan karena keterbatasan ekonomi mereka dalam upaya mempersehat diri dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Tingkat kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukseskan pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, tingkat pendapatan tinggi, tingkat pendidikan tinggi dan sejumlah hal positif lainnya.

⁵ Eka Sulistiana Putri, Skripsi: *"Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 1.

⁶ Andri Nurmalita Suryandari, Skripsi: *"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DIY 2004-214 "* (Yogyakarta: UNY, 2017), hlm. 10-11.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antara jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Menurut Bank Dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, perumahan, dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).⁷

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terdapat di pemerintahan pusat, yaitu tingginya angka kemiskinan. Berikut ini adalah data kemiskinan, Inflasi dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan, Inflasi, PDRB dan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2016

Tahun	Kemiskinan	Inflasi	PDRB	Kesehatan
2010	11.36	8	6.42	67.46
2011	10.83	3.67	6.63	69.65
2012	10.41	3.86	6.22	69.81
2013	10.39	10.18	6.61	69.9
2014	9.85	8.17	5.23	68.04
2015	10.53	3.24	5.1	68.29
2016	10.35	6.34	5.18	68.33

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, www.bps.go.id diakses pada 17 Januari 2018

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 sampai tahun 2016 berkisar 0.04% sampai 0.01% menunjukkan adanya indikasi program pembangunan yang dijalankan telah berhasil. Penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi seiring dengan peningkatan PDRB di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2010 dan 2011, namun terjadi penurunan di tahun 2012 dan kembali naik di tahun 2013 dan 2016.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Sumatera Utara digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. PDRB juga indikator yang mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai

⁷ Dio Syahrullah, Skripsi: “Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten Tahun 2009-2012” (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 2.

perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi jumlah kemiskinan.⁸

Jika dilihat pada data tabel 1.1, dapat dilihat bahwa tahun 2012 tidak sesuai dengan teori, yaitu jika PDRB meningkat maka kemiskinan akan menurun. Namun tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2012, 2014 dan 2015 tidak sesuai dengan teori selama ini. Dimana seharusnya jika kemiskinan turun maka PDRB meningkat. Namun pada tahun 2012, 2014, dan 2015 PDRB juga ikut turun.

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia berfluktuatif. Data diatas mendukung bahwa inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi yang sulit untuk distabilkan. Secara teori inflasi berhubungan lurus dengan kemiskinan. Artinya jika tingkat inflasi menurun maka tingkat kemiskinan juga menurun. Namun, di tahun 2012 dan 2013 data menunjukan ketidak sesuaian. Dimana disaat kemiskinan turun inflasi meningkat.

Dilihat pada tabel 1.1 data kesehatan yang dilihat dari Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari tahun 2011-2013. Dan di tahun 2014 mengalami penurunan namun kembali meningkat pada tahun 2015 sampai 2016. Di tahun 2014 angka harapan hidup mengalami penurunan. Namun di lihat pada tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa tingkat kemiskinan dan angka harapan hidup memiliki hubungan yang negatif. Dimana disaat tingkat kemiskinan menurun seharusnya tingkat angka harapan hidup mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara Periode 2010-2016 menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian, yaitu:

1. Adanya pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
2. Adanya pengaruh variabel produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
3. Adanya pengaruh variabel pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

⁸ Dio Syahrullah, Skripsi: "*Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten Tahun 2009-2012*" (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 4.

4. Adanya pengaruh variabel tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
5. Adanya pengaruh variabel pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
6. Adanya pengaruh variabel kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara

C. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan peneliti baik sisi waktu, biaya maupun keahlian dalam bidang kajian, maka penelitian dibatasi pada dua variabel bebas (*independent variable*) yaitu PDRB, inflasi, dan kesehatan, dan satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu tingkat kemiskinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016?
2. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016?
4. Apakah terdapat pengaruh PDRB, Inflasi, dan Angka Harapan Hidup secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk melihat pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016.
2. Untuk melihat pengaruh Inflasi, terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016.
3. Untuk melihat pengaruh Kesehatan, terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016
4. Untuk menganalisis pengaruh PDRB, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan.

3. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai pengaruh variable makro ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Salain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.⁹

Pemahaman tentang definisi kemiskinan mutlak untuk dipahami, agar persepsi dan interpretasi tentang kemiskinan tidak multitafsir serta dalam intervensi kebijakan tidak salah sasaran. Kemiskinan menurut bank Dunia pada tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial. Ketergantungan fisik meliputi ketidakcukupan dalam kebutuhan dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan dalam nutrisi kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Seseorang dikatakan miskin bila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Sebaliknya ketidakcukupan social meliputi hal-hal yang

⁹ Nunung Nurwati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan" Jurnal kependudukan padjadjaran, vol.10 no. 1, tahun 2008, hlm. 3

lebih luas, yaitu pada resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan dan kepercayaan diri yang kurang.¹⁰

Selain dari itu, Sumodiningrat¹¹ menyebutkan bahwa masyarakat miskin secara umum ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*).
2. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan melakukan kegiatan usaha produktif (*unproductiveness*).
3. Ketidakmampuan menjangkau sumberdaya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*).
4. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan menentukan nasib dirinya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis; dan
5. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Di sisi lain, Chambers¹² mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri (*proper*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

¹⁰ The World Bank Of Jakarta, "Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", (Jakarta, 2006), hlm. 6

¹¹ G Sumodiningrat, "Sambutan dan Laporan Panitia Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Kemiskinan oleh Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan Selaku Sekretaris Panitia Pengarah", (yogyakarta, 2005), hlm. 10

¹² R Chambers. 2001. *The World Development Report : Concepts, content and a chapter 12*. Journal of International Development, hlm. 299-306.

2. Teori-Teori Kemiskinan

Menurut Yusuf¹³ mengungkapkan ada tiga teori-teori tentang kemiskinan, yakni:

1. Teori Konservatif (Oscar Lewis)

Menurut Lewis, teori ini memandang bahwa kemiskinan tidak bermula pada struktur social melainkan berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Hal yang disebutkan Lewis ini hamper sama seperti yang diungkapkan Chambers (pembangunan Desa mulai dari belakang, LP3ES), 1987), orang-orang (non-kategori miskin) memandang orang miskin sebagai manusia yang boros, fatalistic, bodoh dan harus bertanggungjawab atas kemiskinannya sendiri.

2. Teori Liberal (Valentine)

Kaum liberal memandang manusia sebagai makhluk yang baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut mereka budaya kemiskinan hanyalah pakan *realistic and situational adaption* pada lingkungan yang penuh deskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi social ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan deskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan akan segera ditinggalkan.

3. Teori Radikal

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini tidak terlalu memperhatikan *culture of poverty* seperti konsep yang dikemukakan oleh kaum konservatif dan mereka menekankan peran struktur ekonomi, politik, dan sosial. Mereka miskin karena memang dilestarikan untuk miskin. Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS mempunyai makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses

¹³ Muhammad Yusuf, "Ilmu Ekonomi Regional", (Medan, 2012) hlm. 137

layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. (Sahdan, 2005 dalam Prawoto)¹⁴.

3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di daerah perdesaan disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki¹⁵, yaitu:

- a. *Natural assets*; seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets*; menyangkut kualitas sumberdaya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets*; minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di perdesaan.
- d. *Financial assets*; berupa tabungan (*saving*) serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social assets*; berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Menurut Kuncoro¹⁶, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:

¹⁴ N Prawoto, 2009. Memahami kemiskinan dan Strategi penanggulangannya, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 9, No. 1, April 2009, hlm. 56 - 68

¹⁵ Chriswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensi. JMPK Vol. 08/No.03 September/2005, hlm. 123

¹⁶ Mudrajad Kuncoro, "Ekonomika Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Keempat". (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 146

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.¹⁷

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan,¹⁸ yaitu :

4. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan Negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan dinegara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
5. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), hlm. 107.

¹⁸ David Cox, "Outline of presentation on poverty alleviation programs in the asia pasific region". (Makalah disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung, 2004), hlm. 1-6.

6. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bisa gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.
7. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan factor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

Dimensi yang dikemukakan oleh Cox ini jauh lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Hal ini dikarenakan Cox memasukan dimensi globalisasi sebagai salah satu dimensi. Melalui dimensi ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di suatu negara dapat disebabkan oleh pola perekonomian dunia. Perekonomian dunia juga dapat memberikan pengaruh pada pola pembangunan di dalam suatu negara. Dimana pembangunan itu sendiri dapat menjadi sumber penyebab kemiskinan bila pola pembangunan yang diterapkan tidak seimbang untuk setiap wilayah.

Namun demikian, secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara lain: ¹⁹

1. Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada di masyarakat sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat.

¹⁹ Makmun, *Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya*. Jurnal: Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 7, No, 2 Juni 2003, hlm. 9

2. Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilai-nilai yang tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk, dan
3. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian.

Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Sulistiana Putri²⁰ yaitu, inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berujung pada peningkatan kemiskinan.

Selanjutnya penduduk yang berada dalam kategori transisional lebih rentan terhadap kemiskinan. Penyebabnya bisa disebabkan oleh faktor internal karena penduduk kategori ini tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kondisi eksternal. Di samping itu, guncangan dalam bentuk kesehatan karena sakit, guncangan lingkungan, bencana alam, kekerasan, dan ketidakpastian hukum dan rontoknya perekonomian penyebab keluar masuknya rumah tangga dalam kemiskinan. Ketika penduduk hanya memiliki asset terbatas, layanan dasar yang tidak memadai dan tidak efektifnya perlindungan sosial menjadi jebakan orang dalam kemiskinan.

Memahami kemiskinan dengan pengkategorisasian tersebut mempermudah pengambil kebijakan dalam menentukan sifat dan jenis intervensi kebijakan yang akan dilakukan. Pengkategorisasian ini dapat juga membantu mengidentifikasi jalan keluar terhadap kemiskinan sebelum kondisi mereka menjadi kronik.

4. Indikator Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) membuat perkiraan jumlah penduduk miskin (dibedakan antara wilayah perdesaan, perkotaan dan propinsi di Indonesia)

²⁰ Eka Sulistiana Putri, Skripsi: *"Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 67.

yang berpatokan pada pengeluaran rumah tangga menurut data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Penduduk miskin ditentukan berdasarkan pengeluaran atas kebutuhan pokok, yang terdiri dari bahan makanan maupun bukan makanan yang dianggap sebagai “dasar” dan diperlukan dalam jangka waktu agar dapat hidup secara layak.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas. Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

- a. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- b. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahal biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
- c. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahal biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
- d. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.

- e. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
- f. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
- g. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumberdaya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
- h. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
- i. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
- j. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup. Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Bappenas mencakup keseluruhan aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kemiskinan, namun indikator-indikator ini masih sangat umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci yang bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Indikator yang dikemukakan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) jauh lebih spesifik dalam melihat kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat.²¹ Keluarga miskin menurut komite ini adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini, yaitu:

- a. Paling kurang sekali seminggu makan daging, ikan, dan telur
- b. Sekali setahun seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru.
- c. Lantai rumah paling kurang 8 m² per penghuni

Sedangkan kategori keluarga miskin sekali adalah jika keluarga tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini:

- a. Seluruh anggota keluarga umumnya makan dua kali sehari atau lebih.
- b. Memiliki pakain berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah, dan berpergian
- c. Bagian lantai terluas bukan dari tanah

Menurut UNDP²² kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivations*), yaitu kehidupan (lebih dari 30% penduduk Negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun), pendidikan dasar (seperti diukur oleh presentase penduduk buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan).

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan pengeluaran atas kebutuhan pokok, yang terdiri dari bahan makanan maupun bukan makanan yang dianggap sebagai “dasar” dan diperlukan dalam jangka waktu agar dapat hidup secara layak. Dengan cara ini, maka

²¹ Syahyuti, *Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel*, (Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 2006), hlm. 95.

²² Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 198.

kemiskinan diukur sebagai tingkat konsumsi per kapita di bawah suatu standar tertentu yang disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*). Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan (i) biaya untuk memperoleh sekeranjang “*bundle*” makanan dengan kandungan 2.100 kalori per kapita per hari, dan (ii) biaya untuk memperoleh “sekeranjang” bahan bukan makanan yang dianggap dasar seperti pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan.

Kondisi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat berbeda beda atau bersifat heterogen, oleh karena itu perlu dilakukan tingkatan untuk dapat mengetahui kondisi terparah dari kemiskinan. Tingkatan dari kondisi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan,²³ yaitu:

- a. Kelompok yang paling miskin (*destitute*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, tidak memiliki sumber pendapatan, dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial.
- b. Kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar
- c. Kelompok Rentan (*vulnerable group*) merupakan kelompok miskin yang memiliki kehidupan yang lebih baik, namun mereka rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya.

5. Metode Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan pelaporan dalam SUSENAS terbitan BPS, Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

²³ Syahyuti, *Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2006), hlm. 95.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

a. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Berikut rumus perhitungannya:

$$V = \sum V_i = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_{52}$$

$$K = \sum K_i = K_1 + K_2 + \dots + K_{52}$$

$$HK = V/k$$

Dimana :

- i = Jenis komoditi yang masuk dalam komoditi dasar
- V = Nilai pengeluaran ke 52 komoditi
- K = Jumlah kalori ke 52 komoditi
- HK = harga rata-rata kalori ke 52 komoditi

Sehingga untuk mendapatkan pengeluaran minimum makanan dengan proxy kalori 2100 kalori:

$$V' = HK * 2100$$

$$F = V' / F$$

Dimana, F : pengeluaran minimum makanan/batas kecukupan makanan

b. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM)

Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$NF = \sum r_1 V_1$$

Dimana:

Nf : pengeluaran minimum non makanan di provinsi p

V₁ : Nilai pengeluaran komoditi non makanan provinsi p

r : rasio pengeluaran barang non makanan terhadap sub kelompok pengeluaran provinsi

1 : jenis barang non makanan

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting. Diantaranya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitive terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2).

6. Kemiskinan Menurut Pandangan Islam

Kata Miskin asal katanya adalah *as-sakan*, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata; “Huruf *sin*, *kaf* dan *nun* adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatakan, ‘*Sakana asy-syai’u yaskunu sukunan sakinan*.²⁴

Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat gerakannya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia.²⁵

Dalam al-Quran sendiri terdapat 33 ayat yang mengandung kata miskin, diantaranya sebagai berikut:

²⁴ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis*, Juz 3, hlm. 88.

²⁵ Bayu Tri Cahya, “Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran dan Hadits”, *Jurnal Penelitian, Volume 9, Nomor 1*, (STAIN Kudus, 2015), hlm. 47

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.” (Q.S. Albaqarah ayat 268)²⁶

Tarfsir dari ayat tersebut adalah (setan menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat, maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan Allah menjanjikan kepadamu) dengan mengeluarkan nafkah itu (kemampuan dari-Nya) terhadap dosa-dosamu (dan karunia), yakni rezeki sebagai penggantinya (dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (lagi Maha Mengetahui) orang-orang yang suka mengeluarkan nafkah.

a. Kriteria Miskin Menurut Pandangan Islam

Kriteria miskin sebagaimana telah dipaparkan dalam surat At-Taubah ayat 60, mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pada firman Allah swt. yang lain pada surat al-Kahfi ayat 79, menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Begitu pula yang terdapat dalam surat al-Balad ayat 16 yang menerangkan keadaan miskin yang sangat. Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita pahami bahwa kriteria seseorang dikatakan miskin atau fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁷

²⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Tanggerang: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), hlm. 45.

²⁷ Bayu Tri Cahya, “Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran dan Hadits”, *Jurnal Penelitian, Volume 9, Nomor 1*, (STAIN Kudus, 2015), hlm. 52.

B. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama satu periode tertentu.²⁸ Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan index harga. Beberapa index harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:²⁹

- a. Indeks biaya hidup (*consumer price index*): indeks biaya hidup mengukur biaya pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup.
- b. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*): indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga ini sejalan atau searah dengan indeks biaya hidup.
- c. GNP deflator : adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks diatas, dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding dengan dua indeks diatas.

Ada 3 aspek yang tercakup di dalam inflasi, yaitu:³⁰

- a. *Tendency* atau kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibanding dengan sebelumnya, tetapi secara umum tetap menunjukkan kecenderungan meningkat;
- b. *Sustained*. Peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama
- c. *General level of prices*. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya satu macam barang saja.

²⁸ M. Taufiq dan Agus H. "Analisis Dampak Inflasi pada Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Bunga Tabungan terhadap Jumlah Tabungan Bank Umum", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* No. 36, (Semarang: STEI Dharmaputra, 2014), hlm. 3.

²⁹ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1987), hlm. 25- 26.

³⁰ Adrian Sutawijaya dan Zulfahmi, "Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 8, Nomor 2, (Universitas Terbuka, 2012), hlm. 87.

Kondisi inflasi menurut Samuelson & Nordhaus, berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu :³¹

a. Merayap (Creeping Inflation)

Laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun), kenaikan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

b. Inflasi menengah (Gallopning Inflation)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya.

c. Inflasi Tinggi (Hyper Inflation)

Inflasi yang paling parah dengan ditandai dengan kenaikan harga sampai 5 atau 6 kali dan nilai uang merosot dengan tajam. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.

2. Jenis-jenis Inflasi

a. Jenis inflasi menurut sifatnya

Inflasi dibagi kedalam tiga kategori, yakni: merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*), dan inflasi tinggi (*hyper inflation*). Sebenarnya pembagian kedalam tiga kategori tidak ada standar yang pasti. Biasanya *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*). Dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasaya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang.

b. Jenis-jenis Inflasi

Jenis-jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan penggolongannya masing-masing, yaitu:

³¹ Seandy Nandadipa, *Analisis Pengaruh CAR,NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange terhadap DPK* (Studi Kasus Pada Bank Umum di Indonesia periode 2004 – 2008), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 40.

- a. Penggolongan inflasi berdasarkan atas parah tidaknya inflasi dibagi menjadi:³²
 1. Inflasi merayap atau ringan (*creeping inflation*). Merupakan inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
 2. Inflasi sedang atau menengah (*galloping inflation*). Inflasi yang besarnya antara 10%-30% pertahun.
 3. Inflasi berat (*high inflation*). Inflasi yang besarnya antara 30%-100% pertahun.
 4. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*). Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi.
- b. Penggolongan inflasi berdasarkan sebabnya³³
 1. *Demand pull inflation*. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
 2. *Cost push inflation*. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi.
- c. Penggolongan inflasi berdasarkan asal dari inflasi³⁴
 1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru yang gagal
 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga (inflasi) di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang dengan negara kita.
 3. Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan juga produsen barang-barang ekspor tersebut) naik.

c. Faktor-faktor penyebab inflasi dan kebijakan cara mengatasinya

Ada tiga sektor yang memungkinkan menjadi penyebab timbulnya inflasi, yaitu sektor impor-ekspor, sektor tabungan-investasi dan sektor penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila ekspor suatu negara lebih besar dari impornya maka akan ada tekanan inflasi. Tekanan inflasi yang terjadi diakibatkan oleh semakin besarnya jumlah uang yang beredar di dalam negeri karena penerimaan devisa dari luar negeri. Demikian pula jika investasi suatu negara lebih besar dari tabungannya, sehingga untuk membiayai investasi yang lebih besar dari

³² Iskandar putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Kencana Media, 2008), hlm. 402-403.

³³ Iskandar putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Kencana Media, 2008), hlm. 403.

³⁴ Iswadi, "Pengaruh BI Rate, Inflasi, Kurs, dan PDB Rill Terhadap Dana Pihak Ketiga Serta Dampaknya Terhadap Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2015), hlm. 24-25.

tabungan tersebut harus dikeluarkan uang baru maka akan timbul tekanan inflasi. Begitu juga apabila anggaran belanja suatu negara mengalami defisit, artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, sehingga untuk menutupi pengeluaran yang lebih besar itu harus dikeluarkan uang baru maka akan ada tekanan inflasi. Apabila dari ketiga sektor ini terjadi tekanan inflasi maka diketahuilah inflasi yang sesungguhnya.³⁵

Untuk mengatasi permasalahan inflasi, terdapat tiga kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi inflasi tersebut, yaitu³⁶:

- a. Kebijakan moneter. Sebahagian besar kebijakan ini berhubungan dengan politik bank sentral. Maksud dari politik bank sentral ialah untuk menyempitkan pemberian kredit baik oleh bank sentral sendiri maupun oleh badan-badan kredit lainnya yaitu bank dagang. Dengan tujuan akhirnya untuk mengurangi pengeluaran dari masyarakat seluruhnya.
- b. Kebijakan fiskal. Dalam kebijaksanaan fiskal ini ada tiga aspek dari kebijakan tersebut yaitu penurunan pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak, dan mengadakan pinjaman pemerintah.
- c. Kebijakan non moneter. Kebijakan non moneter untuk mengatasi inflasi ada tiga macam, yaitu kenaikan hasil produksi, kebijaksanaan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.

d. Inflasi Menurut Pandangan Islam

Pengertian inflasi dalam Islam tidak berbeda pengertiannya dengan inflasi konvensional. Inflasi adalah sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi merupakan suatu gejala dimana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan diseluruh penjuru suatu negara bahkan dunia. Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan bisa makin meninggi lagi harga barang tersebut jika tidak ditemukannya solusi pemecahan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya inflasi tersebut.

Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di dunia sejak masa dahulu hingga sekarang, dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir.³⁷ Menurutny,

³⁵*Ibid*, hlm. 25.

³⁶*Ibid*, hlm. 26.

³⁷ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 424.

inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus. Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya kedalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.³⁸

Islam tidak mengenal istilah inflasi, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham.³⁹ Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.⁴⁰

Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M - 1441M), yang merupakan ekonom muslim dan juga salah satu murid Ibnu Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (*Natural inflation*) dan inflasi akibat kesalahan manusia (*Human Error Inflation*).

Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau peperangan. Sementara itu, Inflasi jenis kedua menurut Al-Maqrizi disebabkan oleh tiga hal. Pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak berlebihan yang memberatkan petani. Ketiga, jumlah uang yang berlebihan.⁴¹

1. Inflasi Alamiah

Inflasi Alamiah adalah inflasi yang terjadi secara alami, bukan disebabkan oleh berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa negara. Misalnya ketika suatu bencana banjir terjadi, maka akan terjadi gagal panen diberbagai sawah sehingga terjadi kelangkaan bahan makanan dan meningkatnya harga bahan makanan.

Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran juga pernah terjadi dizaman Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak mau menghentikan atau mempengaruhi pergerakan harga ini sesuai Hadist:

Anas meriwayatkan, ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, ” Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW lalu menjawab, ”Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kedhaliman dalam urusan darah dan harta.”

³⁸ *Ibid*, hlm. 424-425.

³⁹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 190

⁴¹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 67-68.

2. Human Error Inflation

Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri (QS Ar-Rum ayat 41):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar-Rum ayat 41)⁴²

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.⁴³

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu wilayah dalam satu periode tertentu, yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan. PDRB dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dan sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.⁴⁴

Penelitian Kuznet menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin

⁴² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Depag RI, *Al- Quran dan terjemah*, (Tangerang: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), hlm. 408

⁴³ Priyo Adi Nugroho, "Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) hlm. 12.

⁴⁴ www.bps.go.id Badan Pusat Statistik

berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian Hermanto S. dan Dwi W. menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Wongdesmiwati menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia.⁴⁵

2. Metode Perhitungan PDRB

Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung PDRB, yaitu:

1) Metode langsung

Perhitungan berdasarkan sepenuhnya pada data daerah yang sama sekali terpisah dari data nasional, sehingga hasil perhitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Metode ini digunakan melalui tiga pendekatan.

a) Pendekatan produksi

Cara produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan sektor-sektor produktif.

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, Gas dan Air bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, hotel dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa⁴⁶

b) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi

⁴⁵Anggit Yoga Permana, Fitrie Arianti, “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009” Diponegoro journal of economics, vol.1 no. 1, tahun 2012, hlm. 2

⁴⁶M. Ridwan, *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2013), hlm. 121.

di suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka NTB adalah jumlah dari faktor-faktor produksi, yaitu:

- a. Upah dan gaji (*wages* = W) → Tenaga Kerja
- b. Sewa tanah (*rent* = R) → Tanah
- c. Bunga modal (*Interest* = I) → Modal
- d. Keuntungan (*profit* = P) → Skill/Entrepreneurship

$$Y = Y_w + Y_i + Y_r + Y_p$$

Semuanya sebelum di potong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini di dalamnya termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung netto, berbeda dengan pendekatan produksi, maka kita perlu mengumpulkan data dari pendapatan faktor-faktor produksi yang dimiliki.

c) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk:

- a. Konsumsi rumah tangga = C
- b. Produsen (pembentukan modal total domestik bruto dan, perubahan stok) = I
- c. Konsumsi pemerintah = G
- d. Ekspor netto = (X-M)

Di dalam suatu wilayah/region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, dengan metode ini penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di produksi.⁴⁷

2) Metode tidak langsung atau alokasi

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu, alokator yang dapat digunakan, yaitu:⁴⁸

- 1. Nilai produksi bruto atau neto yang setiap sektor atau subsektor, pada wilayah yang dialokasikan

⁴⁷www.bps.go.id Badan Pusat Statistik

⁴⁸ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 25.

2. Jumlah produksi fisik
3. Tenaga kerja
4. Penduduk
5. Alokator tidak langsung lainnya.

Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung cenderung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah, sedangkan metode tidak langsung akan merupakan koreksi dalam pembandingan bagi data daerah untuk sektor ekonomi yang mempunyai manajemen terpusat seperti listrik, telkom, bank, PJKA terpaksa menggunakan metode alokasi hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.⁴⁹

D. Kesehatan

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.⁵⁰

Mils dan Gilson dalam permana⁵¹ mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
2. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
3. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
4. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya.

⁴⁹ www.bps.go.id Badan Pusat Statistik

⁵⁰ Anggit Yoga Permana, Fitrie Arianti, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009" Diponegoro journal of economics, vol.1 no. 1, tahun 2012, hlm. 37

⁵¹ Ibid, hlm. 39

Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Variabel-variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan di suatu daerah umumnya terdiri dari:⁵²

1. Tingkat Kesakitan Penduduk

Tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatannya, dimana semakin banyak jumlah keluhan ini maka semakin buruk kesehatan di daerah tersebut.

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan gambaran jumlah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta beserta kapasitas tempat tidurnya. Selain itu juga menjelaskan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan posyandu.

3. Angka Harapan Hidup

Penduduk yang hidup berumur panjang umumnya memiliki tingkat kesehatan yang baik. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

4. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan menggambarkan jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan dan perawat.

Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk

⁵² Anggit Yoga Permana, Fitrie Arianti, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009" *Diponegoro journal of economics*, vol.1 no. 1, tahun 2012, hlm. 37

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Eka Sulistiana Putri tahun 2017,⁵³ Dio Syahrullah tahun 2014,⁵⁴ Priyo Adi Nugroho tahun 2015,⁵⁵ Himawan Yudistira Dama, Dkk tahun 2016,⁵⁶ Anggit Yoga Permana, Fitrie Arianti,⁵⁷ Nunung Nurwati.⁵⁸ Penelitian-penelitian di atas secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Eka Sulistiana Putri	Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	1. Inflasi 2. Pengangguran 3. Demokrasi 4. Kemiskinan	FEM	Variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan di Indonesia
2.	Dio Syahrullah	Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten Tahun 2009-2012	1. PDRB 2. Pendidikan 3. Pengangguran 4. Kemiskinan	Data Panel	PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

⁵³ Eka Sulistiana Putri, Skripsi: *"Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 1.

⁵⁴ Dio Syahrullah, Skripsi: *"Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten Tahun 2009-2012"* (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 1.

⁵⁵ Priyo Adi Nugroho, "Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) hlm. 1.

⁵⁶ Dama dkk, *Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Manado*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Vol. 16 No. 13, Tahun 2016, hlm. 1

⁵⁷ Anggit Yoga Permana, Fitrie Arianti, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009" *Diponegoro journal Of Economics*, vol.1 no. 1, tahun 2012, hlm 1

⁵⁸ Nunung Nurwati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan" *Jurnal kependudukan padjadjaran*, vol.10 no. 1, tahun 2008, hlm. 1

3.	Priyo Adi Nugroho	Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 1999-2013	1. PDRB 2. Tingkat Pendidikan 3. Pengangguran 4. Kemiskinan	model analisis interaktif Miles dan Huberman	Variabel PDRB menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Kemiskinan di kota Yogyakarta
4.	Himawan Yudistira Dama dkk	Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Manado	1. PDRB 2. Kemiskinan	Model Analisis Regresi Sederhana	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Kota Manado
5.	Anggit Yoga Permana, dan Fitri Arianti	Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009	1. PDRB 2. Pengangguran 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Kemiskinan	Uji Asumsi Klasik	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
6.	Nunung Nurwati	Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan	1. Model Pengukuran 2. Permasalahan 3. Alternatif Kebijakan		Tingkat kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu 1999-2006 cenderung mengalami peningkatan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Sulistiana Putri yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia” menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.⁵⁹

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dio Syahrullah yang berjudul “Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten Tahun 2009-2012” menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dengan tingkat keyakinan 95 persen.⁶⁰

Pada penelitian yang dilakukan oleh Priyo Adi Nugroho yang berjudul “Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 1999-2013” menunjukkan bahwa Dari hasil pengamatan data yang telah dilakukan, variabel PDRB menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Kemiskinan di kota Yogyakarta.⁶¹

Pada penelitian yang dilakukan oleh Himawan Yudistira Dama dkk yang berjudul “Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Manado” menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Kota Manado.⁶²

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggit Yoga Permana, dan Fitrie Arianti yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009” menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nunung Nurwati yang berjudul “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan” menunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu 1999-2006 cenderung terus mengalami peningkatan.

⁵⁹ Eka Sulistiana Putri, Skripsi: *"Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 3.

⁶⁰ Dio Syahrullah, Skripsi: *"Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten Tahun 2009-2012"* (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 94.

⁶¹ Priyo Adi Nugroho, "Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013"(Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)hlm. 57.

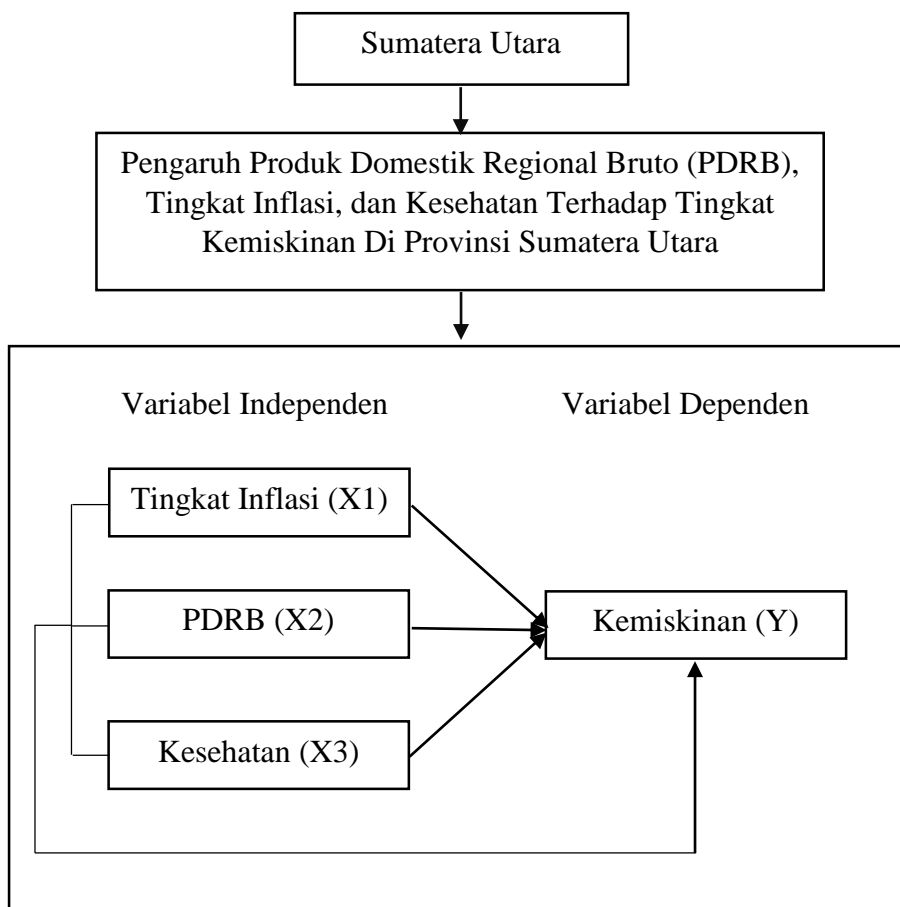
⁶² Himawan Yudistira Dama dkk, *"Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Manado"*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Vol. 16 No. 13, Tahun 2016, hlm. 559.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Biasanya kerangka teori disusun dalam bentuk matriks, bagan atau gambar sederhana.

Adapun yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB (X1), Inflasi (X2), dan Kesehatan (X3) Sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah Kemiskinan di Sumatera Utara 2010-2016 (Y).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai tafsiran yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang akan diuji kebenarannya. Setelah adanya kerangka pemikiran sebelumnya, maka penelitian ini dapat dibuat hipotesis secara parsial dan simultan sebagai berikut:⁶³

1. $H_0 : \beta_1 = 0$: Diduga tidak terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$: Diduga terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. $H_0 : \beta_2 = 0$: Diduga tidak terdapat pengaruh antara Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
 $H_1 : \beta_2 \neq 0$: Diduga terdapat pengaruh antara Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. $H_0 : \beta_3 = 0$: Diduga tidak terdapat pengaruh antara Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
 $H_1 : \beta_3 \neq 0$: Diduga terdapat pengaruh antara Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
4. $H_0 : \beta_4 = 0$: Diduga tidak terdapat pengaruh antara PDRB, Tingkat Inflasi, Kesehatan secara bersamaan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
 $H_1 : \beta_4 \neq 0$: Diduga terdapat pengaruh antara PDRB, Tingkat Inflasi, Kesehatan secara bersamaan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

⁶³ Dio Syahrullah, Skripsi: “Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten Tahun 2009-2012” (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan ekonometrika menggunakan model regresi linear berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan penelitian adalah untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel.⁶⁴ Rancangan penelitian disusun berdasarkan tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, PDRB dan Kesehatan di Sumatera Utara. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari Tingkat Kemiskinan, Tingkat Inflasi, PDRB, dan Kesehatan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, atau dapat dikatakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁵ Populasi pada penelitian ini adalah berupa data PDRB, Inflasi dan Kesehatan yang dilihat dari data Angka Harapan Hidup dari tahun 1948-2016. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah berupa data PDRB, Inflasi dan Kesehatan yang dilihat dari data Angka Harapan Hidup dimulai dari tahun 2010-2016 di Sumatera Utara.⁶⁶

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data melalui data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian dilakukan.⁶⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* pada periode

⁶⁴Naila Hayati, "Pemilihan Metode yang Paling Tepat Dalam Penelitian (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif)", *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad Vol. IV edisi 1*, 2012, hlm. 345-357.

⁶⁵Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 190.

⁶⁶Lincoln Arsyad Soeratan, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi Bisnis* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1995), hlm. 69.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 8, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

2010-2016. Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis persentasi penduduk miskin, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data inflasi, data PDRB, data angka harapan hidup, dan data tingkat kemiskinan di provinsi sumatera utara. Data yang digunakan sebagai latar belakang berupa Tahun yang di ambil dari 2010-2016.

D. Defenisi Operasional

Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari: variabel bebas (X) yaitu PDRB (X1), Tingkat Inflasi (X2), serta variabel terikat (Y) adalah Tingkat Kemiskinan.

1. PDRB (X1)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Data PDRB yang di olah merupakan data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2010-2016 yang di interpolasi menjadi data bulanan.

2. Inflasi (X2)

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama satu periode tertentu.

Data Inflasi yang di olah merupakan data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2010-2016 yang di interpolasi menjadi data bulanan.

3. Kesehatan (X3)

Kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Data kesehatan dapat di lihat berdasarkan tingkat Angka Harapan Hidup (AHH) yang dapat dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2010-2016 yang diinterpolasi menjadi data bulanan.

4. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial.

Data Kemiskinan yang di olah merupakan data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2010-2016 yang di interpolasi menjadi data kuartal.

E. Teknik dan instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dengan menggunakan metode studi dokumen guna mendapatkan informasi lainnya melalui akses internet ke *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan *link* lainnya yang relevan.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, seperti, buku-buku ilmiah, arsip, majalah, peraturan-peraturan dan catatan harian atau solicited. Penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik di Sumatera Utara periode 2010-2016.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression method*). Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda karena variabel independen dalam penelitian lebih dari satu.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel PDRB, Inflasi, dan Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan program *eViews* 8. Analisis ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda dilakukan, maka diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan apakah model tersebut tidak terdapat masalah Normalitas, autokorelasi, dan Linearitas, jika terpenuhi maka model analisis layak untuk digunakan.

Langkah-langkah uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas juga melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati. Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan *Jarque-Bera* test. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas (JB) hitung dengan tingkat alpha 5% (0,05). Apabila prob. JB lebih besar dari nilai alpha maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilai lebih kecil dari alpha maka tidak cukup bukti bahwa residual terdistribusi normal.

Pedoman pengambilan keputusan :

- 1) Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$. Distribusi adalah tidak normal.
- 2) Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$. Distribusi adalah normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test).

Uji DW merupakan salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi. Hampir semua program statistik sudah menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai d (yang menggambarkan koefisien DW).⁶⁸

DW test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. DW test dilakukan dengan membuat hipotesis:

- 1) H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)
- 2) H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

⁶⁸ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2017), hlm.5.21.

- 1) Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (dU) dan (4-dU) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dL) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dL) maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.

c. Uji Linearitas

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritas digunakan untuk mengetahui prediktor data peubah bebas berhubungan secara linier atau tidak dengan peubah terikat. Linearitas merupakan asumsi awal yang seharusnya ada dalam model regresi linear. Uji linieritas dapat dengan mudah dilakukan pada regresi linear sederhana, yaitu membuat *Scatter Diagram* dari var bebas dan terikat. Apabila *Scatter Diagram* menunjukkan garis lurus maka asumsi linearitas terpenuhi. Untuk regresi linear berganda dapat menggunakan *Ramsey Reset Test*. Terjadi atau tidaknya linearitas apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 5% maka model regresi memenuhi asumsi linearitas dan sebaliknya jika lebih kecil maka model tidak memenuhi asumsi linearitas.

2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji signifikansi parameter individual (uji parsial t), signifikansi simultan (uji F), uji determinasi, dan analisis regresi berganda.

a. Uji t Parsial (Uji Signifikansi Individual)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengujian t adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. Tingkat pengujian F adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R^2 menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Sedangkan untuk nilai r^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. r^2 menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

d. Uji Model

Persamaan fungsinya dirumuskan sebagai berikut:

$$TK = a + \beta_1 In - \beta_2 PDRB - \beta_3 Kes + e$$

Dimana:

TK = Tingkat Kemiskinan

α = Konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien regresi berganda

In = Inflasi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Kes = Kesehatan

e = *Error term*

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Kondisi Geografis Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis $1^0 - 4^0$ Lintang Utara dan $98^0 - 100^0$ Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.⁶⁹

Luas dataran Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km², sebagian besar berada di dataran Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km² atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 km² atau sekitar 8,26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.⁷⁰

2. Analisis Deskriptif

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *software statistic Eviews 8* dan *Microsoft Excel 2013*. Data-data yang digunakan untuk variabel dependen yaitu Kemiskinan, sedangkan variabel independennya yaitu PDRB, dan inflasi.

1. Kondisi Kemiskinan Di Sumatera Utara

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.⁷¹ Berikut adalah data persentase data penduduk miskin di Sumatera Utara:

⁶⁹ www.bps.go.id

⁷⁰ www.bps.go.id

⁷¹ www.bps.go.id

Tabel 4.1
Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara 2010-2016

Tahun	Kemiskinan (%)
2010	11,36
2011	10,83
2012	10,41
2013	10,39
2014	9,85
2015	10,53
2016	10,35

Sumber: BPS Sumatera Utara diakses pada, 2018

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 sampai tahun 2016 berkisar 0,04% sampai 0,01% menunjukkan adanya indikasi program pembangunan yang dijalankan telah berhasil. Penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi seiring dengan peningkatan PDRB di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2010 dan 2011, namun terjadi penurunan di tahun 2012 dan kembali naik di tahun 2013 dan 2016.

2. Produk Domestik Regional Bruto di Sumatera Utara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga per tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai tahun dasar.⁷² Berikut data PDRB atas harga konstan di Provinsi Sumatera Utara:

⁷² Dama dkk, *Tingkat Kemiskinan di Manado*, hlm. 549

Tabel 4.2
PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010-2016

Tahun	PDRB (%)
2010	6,42
2011	6,63
2012	6,22
2013	6,61
2014	5,23
2015	5,1
2016	5,18

Sumber: BPS Sumatera Utara

Jika dilihat pada data tabel 4.2, dapat dilihat bahwa tahun 2012 tidak sesuai dengan teori, yaitu jika PDRB meningkat maka kemiskinan akan menurun. Namun tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2012, 2014 dan 2015 tidak sesuai dengan teori selama ini. Dimana seharusnya jika kemiskinan turun maka PDRB meningkat. Namun pada tahun 2012, 2014, dan 2015 PDRB juga ikut turun.

3. Tingkat Inflasi di Sumatera Utara

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Jika hanya satu barang saja yang naik itu bukan disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut berpengaruh pada harga barang yang lain. Indonesia memiliki tingkat inflasi yang tinggi dan terus berfluktuatif. Bahkan terkadang tingkat inflasi yang terjadi tidak sesuai dengan prediksi awal. Jenis inflasi seperti ini dapat menurunkan kinerja atau pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya inflasi yang tinggi menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi berkurang. Akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi dan kesejahteraan masyarakat semakin berkurang.⁷³ Berikut data tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara:

⁷³ Eka Sulistiana Putri, Skripsi: *"Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 1.

Tabel 4.3
Tingkat Inflasi di Sumatera Utara 2010-2016

Tahun	Inflasi (%)
2010	8
2011	3,67
2012	3,86
2013	10,18
2014	8,17
2015	3,24
2016	6,34

Sumber: BPS Sumatera Utara

Dari data tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia berfluktuatif. Data diatas mendukung bahwa inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi yang sulit untuk distabilkan. Secara teori inflasi berhubungan lurus dengan kemiskinan. Artinya jika tingkat inflasi menurun maka tingkat kemiskinan juga menurun. Namun, di tahun 2012 dan 2013 data menunjukkan ketidak sesuaian. Dimana disaat kemiskinan turun inflasi meningkat.

4. Angka Harapan Hidup Sumatera Utara

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukkseskan pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, tingkat pendapatan tinggi, tingkat pendidikan tinggi dan sejumlah hal positif lainnya.⁷⁴ Berikut data angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Utara:

⁷⁴ Andri Nurmalita Suryandari, Skripsi: "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DIY 2004-214 " (Yogyakarta: UNY, 2017), hlm. 10

Tabel 4.4
Angka Harapan Hidup di Sumatera Utara 2010-2016

TAHUN	Angka Harapan Hidup
2010	67,46
2011	69,65
2012	69,81
2013	69,9
2014	68,04
2015	68,29
2016	68,33

Sumber: BPS Sumatera Utara

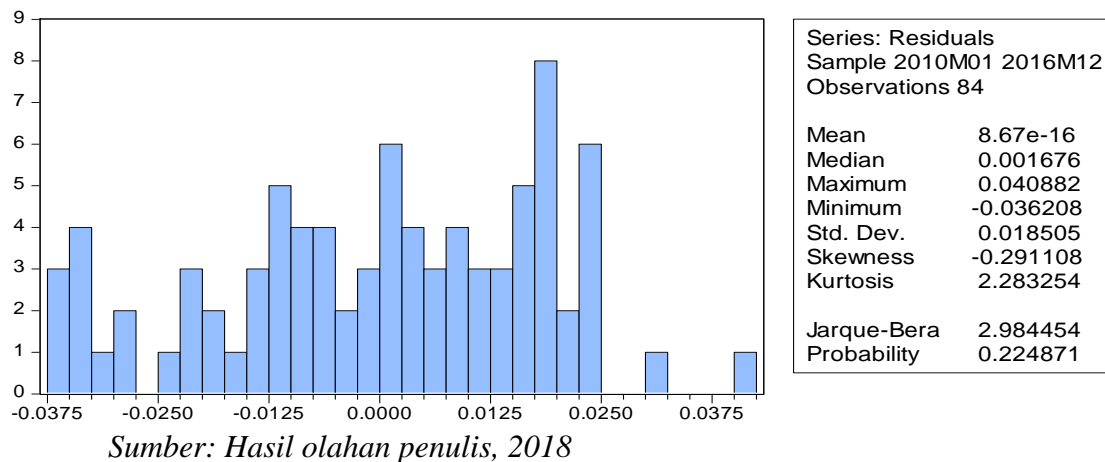
Dilihat pada tabel 4.4 data kesehatan yang dilihat dari Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari tahun 2011-2013. Dan di tahun 2014 mengalami penurunan namun kembali meningkat pada tahun 2015 sampai 2016. Di tahun 2014 angka harapan hidup mengalami penurunan. Namun di lihat pada tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa tingkat kemiskinan dan angka harapan hidup memiliki hubungan yang negatif. Dimana disaat tingkat kemiskinan menurun seharusnya tingkat angka harapan hidup mengalami peningkatan..

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas juga melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati. Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan *Jaque-Bera* test. Hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan grafik 4.1 diatas dapat dilihat bahwa model regresi terdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai Prob. JB 0,224871 yang lebih besar dari nilai alpha 0,05. Maka asumsi klasik tentang normalitas terpenuhi.

2. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya *crossection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, dilakukan pengujian dengan uji Durbin Watson, yaitu membandingkan nilai d dari hasil regresi dengan dL dan dU dari tabel Durbin Watson. Berikut ini hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokolerasi

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 09/26/18 Time: 13:17
Sample: 2010M01 2016M12
Included observations: 84
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGIN	-0.001976	0.001866	-1.058834	0.2929
LOGPDRB	-0.004944	0.008628	-0.573023	0.5683
LOGKES	0.023897	0.074155	0.322254	0.7481
C	-0.046754	0.132755	-0.352182	0.7257
RESID(-1)	1.051363	0.112046	9.383285	0.0000
RESID(-2)	-0.134124	0.113176	-1.185093	0.2396
R-squared	0.859102	Mean dependent var	8.67E-16	
Adjusted R-squared	0.850071	S.D. dependent var	0.018505	
S.E. of regression	0.007165	Akaike info criterion	-6.970351	
Sum squared resid	0.004005	Schwarz criterion	-6.796722	
Log likelihood	298.7548	Hannan-Quinn criter.	-6.900554	
F-statistic	95.11878	Durbin-Watson stat	1.610646	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa nilai DW = 1,610646 nilai ini akan dibandingkan dengan tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel (n=84) dan jumlah variabel independent (K=3) dengan dL=1,5723 dan dU=1,7199. Karena DW terletak antara dU dan (4-dU) = 1,5723 < 1,610646 < 1,7199 (nilai DW lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari (4-dU)) maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokolerasi pada model regresi ini.

3. Uji Linearitas

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritas digunakan untuk mengetahui prediktor data peubah bebas berhubungan secara linier atau tidak dengan peubah terikat. Linearitas merupakan asumsi awal yang seharusnya ada dalam model regresi linear. Hasil uji linearitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Linearitas

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: LOGMIS LOGIN LOGPDRB LOGKES C
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	Df	Probability
t-statistic	1.225965	79	0.2239
F-statistic	1.502989	(1, 79)	0.2239
Likelihood ratio	1.583103	1	0.2083

F-test summary:

	Sum of Sq.	Df	Mean Squares
Test SSR	0.000531	1	0.000531
Restricted SSR	0.028423	80	0.000355
Unrestricted SSR	0.027893	79	0.000353
Unrestricted SSR	0.027893	79	0.000353

LR test summary:

	Value	Df
Restricted LogL	216.4464	80
Unrestricted LogL	217.2380	79

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diketahui bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada nilai Prob F. hitung dapat dilihat pada F-statistic kolom Probability, pada model regresi ini nilainya 0,2239 lebih besar dari tingkat alpha yang 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi ini memenuhi asumsi linearitas.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji t Parsial (Uji Signifikansi Individual)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dari variabel-variabel independen (Inflasi, PDRB, Kesehatan) terhadap variabel dependen (Tingkat Kemiskinan). Hasil Uji t Parsial dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji t Parsial

Dependent Variable: LOGMIS
Method: Least Squares
Date: 09/26/18 Time: 13:20
Sample (adjusted): 2010M01 2016M12
Included observations: 84 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGIN	-0.047894	0.004845	-9.885242	0.0000
LOGPDRB	0.395001	0.022608	17.47148	0.0000
LOGKES	-2.729768	0.194693	-14.02090	0.0000
C	4.880287	0.348451	14.00565	0.0000

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, maka ditemukan hasil uji t sebagai berikut:

1) Pengaruh variabel Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh nilai probabilitas signifikansi untuk variabel inflasi sebesar 0,0000. Hasil penelitian diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan periode Sumatera Utara 2010-2016.

2) Pengaruh variabel PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh nilai probabilitas signifikansi untuk variabel PDRB sebesar 0,0000. Hasil penelitian diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan periode Sumatera Utara 2010-2016.

3) Pengaruh variabel Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh nilai probabilitas signifikansi untuk variabel Kesehatan sebesar 0,0000. Hasil penelitian diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010-2016.

2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji Simultan (Uji F) untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan

Dependent Variable: LOGMIS
Method: Least Squares
Date: 09/26/18 Time: 13:20
Sample (adjusted): 2010M01 2016M12
Included observations: 84 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGIN	-0.047894	0.004845	-9.885242	0.0000
LOGPDRB	0.395001	0.022608	17.47148	0.0000
LOGKES	-2.729768	0.194693	-14.02090	0.0000
C	4.880287	0.348451	14.00565	0.0000
R-squared	0.807173	Mean dependent var	-0.131424	
Adjusted R-squared	0.799942	S.D. dependent var	0.042142	
S.E. of regression	0.018849	Akaike info criterion	-5.058248	
Sum squared resid	0.028423	Schwarz criterion	-4.942495	
Log likelihood	216.4464	Hannan-Quinn criter.	-5.011716	
F-statistic	111.6263	Durbin-Watson stat	0.096180	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dilihat pengaruh simultan variabel independen Inflasi, PDRB dan Kesehatan terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan. Dari uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 111,6263 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Inflasi, PDRB dan Kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan periode 2010-2016.

3. Koefisien Determinan

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai *R-square* yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen sangat terbatas. Hasil koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefesien Determinan

Dependent Variable: LOGMIS
Method: Least Squares
Date: 09/26/18 Time: 13:20
Sample (adjusted): 2010M01 2016M12
Included observations: 84 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGIN	-0.047894	0.004845	-9.885242	0.0000
LOGPDRB	0.395001	0.022608	17.47148	0.0000
LOGKES	-2.729768	0.194693	-14.02090	0.0000
C	4.880287	0.348451	14.00565	0.0000
R-squared	0.807173	Mean dependent var	-0.131424	
Adjusted R-squared	0.799942	S.D. dependent var	0.042142	
S.E. of regression	0.018849	Akaike info criterion	-5.058248	
Sum squared resid	0.028423	Schwarz criterion	-4.942495	
Log likelihood	216.4464	Hannan-Quinn criter.	-5.011716	
F-statistic	111.6263	Durbin-Watson stat	0.096180	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018

Hasil perhitungan koefisien regresi dalam penelitian ini memperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,807173. Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan variansi dari variabel dependen sebesar 80% sedangkan sisanya sebesar 20% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain diluar variabel penelitian.

D. Pengujian Regresi Linier Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabelvariabel bebas terhadap variabel terikat. Data yang diperoleh dari tiap indikator variabel, akan dihitung secara bersama-sama melalui suatu persamaan regresi berganda. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan *Eviews 8*, diperoleh hasil regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 4.10
Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LOGMIS
Method: Least Squares
Date: 09/26/18 Time: 13:20
Sample (adjusted): 2010M01 2016M12
Included observations: 84 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGIN	-0.047894	0.004845	-9.885242	0.0000
LOGPDRB	0.395001	0.022608	17.47148	0.0000
LOGKES	-2.729768	0.194693	-14.02090	0.0000
C	4.880287	0.348451	14.00565	0.0000
R-squared	0.807173	Mean dependent var	-0.131424	
Adjusted R-squared	0.799942	S.D. dependent var	0.042142	
S.E. of regression	0.018849	Akaike info criterion	-5.058248	
Sum squared resid	0.028423	Schwarz criterion	-4.942495	
Log likelihood	216.4464	Hannan-Quinn criter.	-5.011716	
F-statistic	111.6263	Durbin-Watson stat	0.096180	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada regresi ini adalah:

$$TK = 4,880287 - 0,047894in + 0,395001pdrb - 2,729768kes$$

Dimana:

TK = Tingkat Kemiskinan

in = Inflasi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

kes = Kesehatan

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 4,880287Konstanta tersebut menyebutkan bahwa jika Inflasi (in), Produk Domestik Regoinal Bruto (PDRB) dan Kesehatan (kes) nilainya dianggap tetap atau nol, maka Tingkat Kemiskinan (TK) nilainya adalah 0,348451
- Koefisien regresi variabel Inflasi (in) sebesar -0,047894 menyatakan bahwa jika penambahan inflasi sebesar satu persen maka Tingkat Kemiskinan (TK) akan mengalami penurunan sebesar -0,047894.
- Koefisien regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,395001 menyatakan bahwa jika penambahan PDRB sebesar satu persen maka Tingkat Kemiskinan (TK) akan mengalami peningkatan sebesar 0,395001.

- d. Koefisien regresi variabel Kesehatan (kes) sebesar -2,729768 menyatakan bahwa jika penambahan Tingkat Kesehatan sebesar satu persen maka Tingkat Kemiskinan (TK) akan mengalami penurunan sebesar -2,729768.

E. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, diketahui inflasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap Tingkat Kemiskinan periode 2010-2016. Koefisien regresi variabel Inflasi (in) sebesar -0,047894 menyatakan bahwa jika pengurangan inflasi sebesar satu persen maka Tingkat kemiskinan (TK) akan mengalami penambahan sebesar -0,047894. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara inflasi dan Tingkat Kemiskinan, semakin naik inflasi maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori selama ini yang menyatakan kemiskinan dan inflasi berhubungan positif.

Dalam uji t, diperoleh nilai probabilitas signifikansi inflasi sebesar 0,0000. Nilai probabilitas signifikansi (0,0000) yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang diharapkan (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada periode 2010-2016. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Walida Mustamin, dkk⁷⁵ yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap Tingkat kemiskinan. Adanya hubungan yang negatif antara inflasi terhadap kemiskinan, memberikan implikasi bahwa walaupun data menunjukkan tingkat inflasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif, maka tidak berimplikasi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu adanya hasil yang negatif antara inflasi terhadap kemiskinan, karena adanya kondisi dan situasi di mana daya beli masyarakat dalam suatu daerah bersifat heterogen atau tidak sama, sehingga selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang yang tersediadari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar.

2. Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji linier berganda, diketahui PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap Tingkat kemiskinan pada periode 2010 sampai 2016. Koefisien regresi

⁷⁵ Siti Walidah Bustamin, "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan" Jurnal Analisis, vol.4 no. 2, tahun 2015, hlm. 172

variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,395001 menyatakan bahwa jika penambahan PDRB sebesar satu persen maka Tingkat Kemiskinan (TK) akan mengalami peningkatan sebesar 0,395001. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara PDRB dan Tingkat Kemiskinan, semakin naik PDRB maka semakin meningkat Kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Okoum dalam penelitian Nenik Woyanti⁷⁶ juga menjelaskan bahwa beberapa negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan Ekonomi yang tinggi tidak selalu berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya sebagian besar negara berkembang belum berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang dikategorikan berkualitas, atau boleh jadi tidak dirasakan oleh masyarakat yang tergolong miskin.

Dalam uji t, diperoleh nilai probabilitas signifikansi untuk variabel PDRB sebesar 0,0000. Nilai probabilitas signifikansi (0,0000) yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang diharapkan (0,05). Sehingga PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan

3. Pengaruh Variabel Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji linier berganda, diketahui bahwa variabel Kesehatan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan pada periode 2010-2016 Koefisien regresi variabel Kesehatan (kes) sebesar -2,729768 menyatakan bahwa jika penambahan Tingkat Kesehatan sebesar satu persen maka Tingkat Kemiskinan (TK) akan mengalami penurunan sebesar -2,729768. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara variabel Kesehatan dan Tingkat Kemiskinan, semakin naik Tingkat Kesehatan maka semakin turun Tingkat Kemiskinan.

Dalam uji t, diperoleh nilai probabilitas signifikansi untuk variabel Kesehatan sebesar 0,0000. Nilai probabilitas signifikansi (0,0000) yang lebih kecil dari nilai signifikansi (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesehatan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada periode 2010-2016. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggit Yoga Permana, dkk,⁷⁷ bahwa kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

⁷⁶ Nenik Woyanti, "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah 2011-2015" Media Ekonomi dan manajemen, vol 33 no. 1, tahun 2018, hlm. 25

⁷⁷ Anggit Yoga Permana, Fitri Arianti, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009" Diponegoro journal Of economics, vol.1 no. 1, tahun 2012, hlm. 6

4. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Uji F dapat dikemukakan bahwa tingkat inflasi, PDRB, dan Kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Dari uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 111,6263 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Inflasi, PDRB, dan Kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan periode 2010-2016. Ketiga variabel bebas tersebut secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan sebesar 80%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh model persamaan sebesar 80%, sedangkan sisanya 20% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara periode 2010–2016. Inflasi di Sumatera Utara memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika inflasi meningkat maka kemiskinan akan mengalami penurunan.
2. PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi tidak merata dan didominasi oleh kontribusi masyarakat golongan berpendapatan tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh pemerataan akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada suatu daerah.
3. Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi derajat kesehatan maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Secara simultan inflasi, PDRB, dan kesehatan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan periode 2010-2016.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran antara lain :

1. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Sumatera Utara, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan pemerataan pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah di Sumatera Utara.
2. Diharapkan kepada Pemerintah agar memfokuskan perhatiannya pada program pengentasan kemiskinan, agar tingkat kemiskinan bisa menurun.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang telah saya lakukan untuk melihat faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selain dari faktor-faktor yang telah penulis teliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, Moch Doddy. *Ekonometrika : Esensi dan Aplikasi Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Bustamin, Siti Walidah. “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Analisis*, vol.4 no. 2. 2015
- Cahya, Bayu Tri. 2015. “Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran Dan Hadits”, *Jurnal Penelitian*, Volume 9, Nomor 1, (STAIN Kudus). 2015.
- Chambers, R. “The World Development Report : Concepts, content and a chapter 12”. *Journal of International Development* 13:299-306. 2001.
- Cox, David. *Outline of presentation on poverty alleviation programs in th asia pasific region*. (Makalah disampaikan pada International Seminar on Curriculum Developpent for Social Work Education in Indonesia), Bandung. 2004
- Dama, Himawan Yudistira dkk. “Pengaruh PDRB terhada Tingkat Kemiskinan di Manado”. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*. Vol. 16 No. 13. 2016
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2009
- Humairo, Izzawati. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai* (Tesis). Medan, UNIMED. 2014.
- Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al- Lughah*, Juz 4, Cet. Ke-1, Beirut, Dar al-Jail, 1420 H/1999 M
- Iswadi, *Pengaruh BI Rate, Inflasi, Kurs, dan PDB Rill Terhadap Dana Pihak Ketiga Serta Dampaknya Terhadap Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2015.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Keempat. UPP STIM YKPN 2006.
- Makmun, 2003. “Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya”. *Jurnal: Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol 7, No, 2 Juni 2003
- Nandadipa, Seandy. *Analisis Pengaruh CAR,NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange terhadap DPK* (Studi Kasus Pada Bank Umum di Indonesia periode 2004 – 2008), 2010.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter Buku 2*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 1987

- Nugroho, Priyo Adi, *Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013*, 2015.
- Permana, Anggit Yoga, Fitrie Arianti. “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”, *Diponegoro journal Of economics*, vol.1 no. 1. 2012
- Prawoto, N. “Memahami kemiskinan dan Strategi penanggulangannya”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2009: 56 - 68*
- Putong, Iskandar. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Kencana Media. 2008
- Putri, Eka Sulistiana. *Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*, 2017.
- Ridwan, M. *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro Islam*, Bandung: Ciptapustaka Media. 2013.
- Situs Resmi Badan Pusat Statistik (bps.go.id).
- Sucahyo, Indra Budi. *Analisis Hubungan Suku Bunga SBI, Pertumbuhan Ekonomi, dan Financial Deepening di Indonesia* (Skripsi). Surabaya , Universitas Airlangga. 2008
- Soeratno, Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. Ke 8. 2009
- Sumodiningrat G. Sambutan dan Laporan Panitia Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Kemiskinan oleh Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan Selaku Sekretaris Panitia Pengarah. Yogyakarta. 2005
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta: Kencana. 2015
- Suryawati C. “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensi”. *JMPK Vol. 08/No.03 September/2005*.
- Sutawijaya, Adrian dan Zulfahmi. “Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, (Universitas Terbuka)*. 2012.

- Syahrullah, Dio, *Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten Tahun 2009-2012*, 2014.
- Syahyuti. *Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel*, Jakarta: Bina Rena Pariwara. 2006
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Taufiq, M dan Agus H. “Analisis Dampak Inflasi pada Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Bunga Tabungan terhadap Jumlah Tabungan Bank Umum”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi No. 36*, (Semarang: STEI Dharmaputra). 2014
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2000
- Winarno, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Yogyakarta: STIM YKPN, Edisi ke 5. 2017
- Woyanti, Nenik. “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah 2011-2015”, *Media Ekonomi dan manajemen, vol 33 no. 1*. 2018
- Yusuf, Muhammad. *Ilmu Ekonomi Regional*, Medan: Perdana Publishing. 2012

Lampiran:

uji otokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	237.7969	Prob. F(2,78)	0.0000
Obs*R-squared	72.16461	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/26/18 Time: 13:17

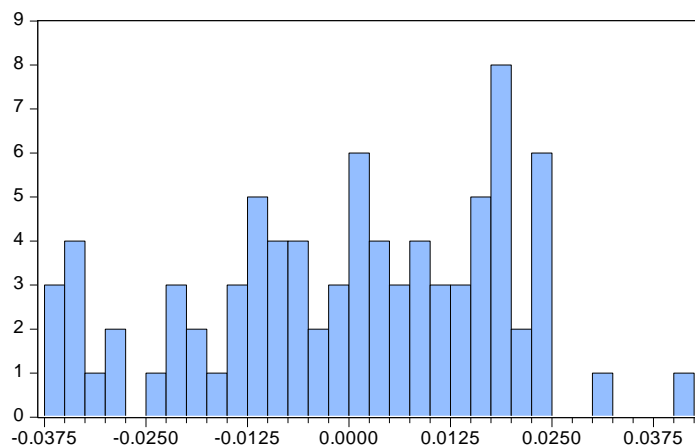
Sample: 2010M01 2016M12

Included observations: 84

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGIN	-0.001976	0.001866	-1.058834	0.2929
LOGPDRB	-0.004944	0.008628	-0.573023	0.5683
LOGKES	0.023897	0.074155	0.322254	0.7481
C	-0.046754	0.132755	-0.352182	0.7257
RESID(-1)	1.051363	0.112046	9.383285	0.0000
RESID(-2)	-0.134124	0.113176	-1.185093	0.2396
R-squared	0.859102	Mean dependent var	8.67E-16	
Adjusted R-squared	0.850071	S.D. dependent var	0.018505	
S.E. of regression	0.007165	Akaike info criterion	-6.970351	
Sum squared resid	0.004005	Schwarz criterion	-6.796722	
Log likelihood	298.7548	Hannan-Quinn criter.	-6.900554	
F-statistic	95.11878	Durbin-Watson stat	1.610646	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji normalitas



Series: Residuals
Sample 2010M01 2016M12
Observations 84

Mean 8.67e-16
Median 0.001676
Maximum 0.040882
Minimum -0.036208
Std. Dev. 0.018505
Skewness -0.291108
Kurtosis 2.283254

Jarque-Bera 2.984454
Probability 0.224871

Uji Linearitas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: LOGMIS LOGIN LOGPDRB LOGKES C

Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	1.225965	79	0.2239
F-statistic	1.502989	(1, 79)	0.2239
Likelihood ratio	1.583103	1	0.2083

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.000531	1	0.000531
Restricted SSR	0.028423	80	0.000355
Unrestricted SSR	0.027893	79	0.000353
Unrestricted SSR	0.027893	79	0.000353

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	216.4464	80
Unrestricted LogL	217.2380	79

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: LOGMIS

Method: Least Squares

Date: 09/26/18 Time: 13:19

Sample: 2010M01 2016M12

Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGIN	0.007244	0.045234	0.160156	0.8732
LOGPDRB	0.005009	0.318908	0.015706	0.9875
LOGKES	-0.221813	2.054885	-0.107944	0.9143
C	0.345049	3.715595	0.092865	0.9262
FITTED^2	-4.285808	3.495866	-1.225965	0.2239
R-squared	0.810773	Mean dependent var		-0.131424
Adjusted R-squared	0.801192	S.D. dependent var		0.042142
S.E. of regression	0.018790	Akaike info criterion		-5.053285
Sum squared resid	0.027893	Schwarz criterion		-4.908593
Log likelihood	217.2380	Hannan-Quinn criter.		-4.995120
F-statistic	84.62185	Durbin-Watson stat		0.083777
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil output:

Dependent Variable: LOGMIS

Method: Least Squares

Date: 09/26/18 Time: 13:20

Sample (adjusted): 2010M01 2016M12

Included observations: 84 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGIN	-0.047894	0.004845	-9.885242	0.0000
LOGPDRB	0.395001	0.022608	17.47148	0.0000
LOGKES	-2.729768	0.194693	-14.02090	0.0000
C	4.880287	0.348451	14.00565	0.0000
R-squared	0.807173	Mean dependent var	-0.131424	
Adjusted R-squared	0.799942	S.D. dependent var	0.042142	
S.E. of regression	0.018849	Akaike info criterion	-5.058248	
Sum squared resid	0.028423	Schwarz criterion	-4.942495	
Log likelihood	216.4464	Hannan-Quinn criter.	-5.011716	
F-statistic	111.6263	Durbin-Watson stat	0.096180	
Prob(F-statistic)	0.000000			